

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

Elviaty Helinda Tauran¹ Dan Achmad Djunaedi²
^{1,2}UGM Yogyakarta

tauranelvi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to answer the problem of tourism development in the Cendrawasih Bay National Park through the formulation of alternative tourism development policies for the Wondama Bay Regency. To formulate an alternative policy, it uses two stages. The first stage uses logical argumentation method based on system thinking or system thinking which is expressed by the Causal Loop Diagram (CLD). In the second phase, a policy research is conducted which aims to propose alternative policies related to local tourism development, especially in the focus that has been chosen in the first phase. This study is qualitative, with data collection techniques used are through field observation, in-depth interviews with predetermined informants. Meanwhile, secondary data is obtained through literature study of sources that have relevance to the focus of the study. The results of the study show that from the two stages of this research, the management that has been more focused by the central government has not involved local communities and local governments. Management by the central government is the culmination of the iceberg phenomenon, where from the existing problem traced through the system thinking method which is explained in the CLD, it is known that the management by the central government has an impact on the level of involvement of the lesser community. Managing collaboration between stakeholders, budget allocation policies, increasing promotion and developing tourism destinations in Teluk Wondama Regency is a short-term solution to solve these problems. Furthermore, the intervention policy for the development of tourist destinations in Teluk Wondama Regency was analyzed in stage II. Based on aspects that affect tourism development policies that want to be achieved measured through the policy selection criteria that have been determined, then the alternative policy options offered are Development of Tourist Attraction to improve product quality and competitiveness in attracting the interest and loyalty of existing market segments because according to the needs of tourists for travel and economic needs of the community, this alternative policy can represent both parties, here another, with the existence of new tourist objects in the land area, the local government of Teluk Wondama Regency can attract retribution from tourists to patch locally-generated revenue.

Keywords: System Thinking, Policy, Tourism Development, CLD

PENDAHULUAN

Pembangunan pada prinsipnya adalah proses perubahan pokok pada masyarakat dari sebuah keadaan tertentu menuju kepada keadaan yang dinilai lebih baik. Phillip Roup 1993 dalam Bambang Sunaryo (2013) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan nasional tertentu yang dianggap kurang dikehendaki menuju ke sesuatu keadaan nasional tertentu yang dinilai lebih dikehendaki. Pada pembatasan makna yang lain, paradigma pembangunan juga dapat berarti sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai dan strategi yang diterapkan untuk memandang dan mensikapi suatu fenomena realitas dan sebuah komunitas dalam perspektif yang sama, khususnya dalam suatu disiplin tertentu. Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata maka paradigma pengembangan pariwisata bisa diartikan sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek strategi yang diterapkan dalam pembangunan kepariwisataan atau dengan kata lain paradigma pengembangan kepariwisataan merupakan kerangka atau model berpikir yang digunakan untuk melandasi perencanaan pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh dalam suatu komunitas disuatu periode waktu tertentu. (Bambang Sunaryo, 2013)

Kabupaten Teluk Wondama merupakan sebuah kabupaten yang terletak di daerah leher kepala burung pulau Papua yang memiliki potensi yang beraneka ragam mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan kelautan. Selain sumber daya alam yang dikemukakan sebelumnya, salah satu potensi alam yang sangat menjanjikan bagi masa depan kabupaten Teluk Wondama adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor

potensial untuk dikembangkan di kabupaten Teluk Wondama. Keanekaragaman flora dan fauna serta pemandangan alam yang indah, unik dan khas, baik di darat maupun bawah laut sangat berpotensi untuk menarik wisatawan. (Torey, 2016).

Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) merupakan taman nasional laut terluas di Indonesia (1.453.500 ha). Ada lebih dari 950 spesies ikan karang ditemukan di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kawasan ini merupakan rumah bagi populasi mega fauna termasuk hiu paus (*Rhinocodon typus*), ikan duyung (*dugong dugon*), Napoleon wrasse, penyu dan populasi predator yang relatif sehat seperti hiu.

Taman Nasional Teluk Cendrawasih selama ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih dibawa naungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini masuk dalam dua wilayah administrative yaitu Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat sebanyak lebih kurang 80% dan Kabupaten Nabire Propinsi Papua sebanyak lebih kurang 20%. Selama ini pengelolaan yang berlangsung adalah pengelolaan berbasis konservasi dimana sekarang sudah mulai dibuka untuk kegiatan wisata dengan tujuan wisata utama pengamatan Hiu Paus atau Whale Shark.

Berdasarkan data dari BBTNTC, kegiatan wisata di Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini mulai didata tahun 2012, dimana wisatawan yang berkunjung dikenakan biaya SIMAKSI atau Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi. Biaya SIMAKSI dihitung berdasarkan jumlah peserta tur, lama tinggal didalam perairan taman nasional, aktivitas yang akan dilakukan didalam kawasan konservasi.

Selama ini pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Teluk

Cendrawasih ini belum memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Teluk Wondama. Untuk itu penelitian ini akan mencoba menganalisis solusi penyelesaian bagi permasalahan pengembangan pariwisata di Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang dihadapi oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya, memberikan alternatif solusi kebijakan bagi permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode berpikir sistem dengan cara mencari hubungan sebab akibat dari permasalahan tersebut yang disajikan dalam bentuk Causal Loop Diagram. Rowitz (2002) dalam Hernowo 2010 mendefinisikan berpikir sistem adalah cara melihat dan mendiskusikan kenyataan yang membantu meningkatkan pemahaman dan kerjasama pada organisasi dan komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan analisis hubungan sebab akibat dalam CLD ini dan melihat solusi yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari solusi yang telah ditemukan selanjutnya dianalisis untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diusulkan menjadi kebijakan yang tepat untuk pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Pengolahan data dilakukan dengan menyusun kategori. Data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan tema masing-masing. Kemudian tema-tema tersebut disusun dalam diagram kerangka sistem logis dengan mempertimbangkan keterkaitan dan hubungan antar faktor. Prosedur analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Mereduksi data lapangan menjadi unit-unit informasi
- b. Mengelompokkan unit informasi ke dalam faktor yang disesuaikan dengan unit informasinya
- c. Menyusun konsepsi berdasar kelompok faktor
- d. Menempatkan faktor-faktor ke dalam Causal Loop Diagram (CLD)
- e. Melengkapi CLD dengan melakukan pengembangan faktor
- f. Mereduksi CLD menjadi komponen pokok masalah
- g. Melakukan perbandingan komponen pokok masalah terhadap konsepsi masalah

Selain teknik analisis data, dalam penelitian kebijakan juga ada teknik dalam penentuan alternatif kebijakan untuk memudahkan pemilihan kebijakan yang terbaik. Metode yang digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan adalah metode perbandingan, yaitu dengan membuat perbandingan alternatif kebijakan dengan ukuran yang sama untuk semua alternatif kebijakan. Untuk memudahkan dalam menilai masing-masing pilihan alternatif kebijakan, pertama-tama masing-masing alternatif kebijakan dipilih melalui standar atau ukuran yang sama yaitu berdasarkan tujuan dan alasan pemilihan alternatif.

Selanjutnya masing-masing pilihan alternatif akan diseleksi melalui kriteria-kriteria evaluasi yang dapat digunakan dalam melakukan atau memutuskan rekomendasi untuk tindakan diantaranya dengan menggunakan Bardach Typologi ataupun kategori kriteria evaluasi menurut Dunn. Bardach (2012) dalam LAN (2015) membagi kriteria evaluasi menjadi 4 kriteria yaitu:

- a. *Technical feasibility*: mengukur apakah alternatif kebijakan yang diajukan secara teknis dapat menacapai tujuan yang ditetapkan,

- b. Economic and financial possibility: berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap alternatif kebijakan dan apakah yang nantinya dihasilkan dapat disebut dengan kemanfaatan,
- c. Political viability: mengukur apakah setiap alternatif kebijakan akan memberikan dampak kekuatan secara politis bagi kelompok-kelompok tertentu.
- d. Administrative operability: mengukur kemungkinan diterapkannya alternatif kebijakan tersebut dari perspektif administrative (ketersediaan SDM, finansial, fasilitas, maupun waktu)
- Sedangkan Dunn dalam LAN (2015) membagi kriteria evaluasi menjadi 6 (enam) kriteria seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kategori Kriteria Evaluasi

Kriteria	Esensi
Efektivitas	Apakah alternatif yang direkomendasikan memberikan hasil (akibat) yang maksimal? (untuk kesejahteraan masyarakat)
Efisiensi	Apakah alternatif yang direkomendasikan membuahkan hasil yang rasio efektivitas biayanya lebih tinggi dari batas tertentu (efisiensi marginal)
Kecukupan	Seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan
Kesamaan	Apakah alternatif yang direkomendasikan menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil terhadap sumber yang ada dalam masyarakat
Responsivitas	Seberapa jauh alternatif tersebut dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Kelayakan	Apakah alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan yang layak

Sumber: Dunn (2003) dalam LAN (2015)

Kemudian disimpulkan melalui tabel, agar lebih memudahkan membaca dampak dan resiko pilihan kebijakan. Kemudian pilihan alternatif kebijakan direkap dan diberi nilai dengan skor yang telah ditetapkan. Alternatif yang memperoleh skor paling tinggi adalah alternatif yang dijadikan sebagai pilihan alternatif kebijakan terbaik.

Standar yang digunakan dalam memilih alternatif kebijakan adalah

dampak, biaya, tingkat kesulitan teknis, dan probabilitas keberhasilan. Untuk dampak positif diukur dengan standar besar, cukup, kecil. Biaya diukur dengan besar, sedang, kecil. Tingkat kesulitan teknis diukur dengan tinggi, sedang, rendah. Sedangkan probabilitas keberhasilan diukur dengan besar, sedang, kecil. Masing-masing standar ini diberi skor sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Penentuan Alternatif Kebijakan

Standar	Keterangan	Skor
Dampak	Besar; Apabila dampak positif yang ditimbulkan besar dan memberikan dampak lain yang lebih luas	3
	Cukup; Apabila dampak yang diberikan cukup dan tidak memberikan dampak lain yang besar	2
	Kecil; Kurang mendukung permasalahan.	1

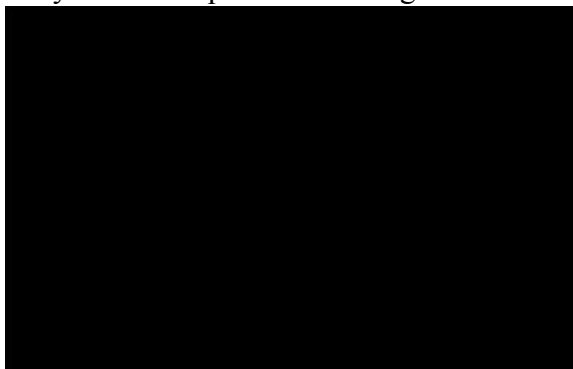
Biaya	Kecil; Bila biaya yang dibutuhkan kecil sehingga lebih menguntungkan	3
	Cukup; Bila biaya yang dibutuhkan sepadan dengan hasil yang diharapkan, sehingga dianggap menguntungkan	2
	Besar; Biaya yang dibutuhkan besar, sehingga dianggap tidak menguntungkan.	1
Tingkat Kesulitan Teknis	Rendah; apabila kesulitan teknis yang dihadapi rendah, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan	3
	Sedang; tingkat kesulitan teknis tidak begitu sulit, sehingga masih mungkin untuk dilaksanakan	2
	Tinggi; Tingkat kesulitan teknis tinggi sehingga sulit untuk dilaksanakan	1
Probabilitas Keberhasilan	Besar; kemungkinan berhasilnya besar karena sangat mungkin untuk dilaksanakan, didukung oleh sumber daya yang ada dan relevan untuk tujuan organisasi	3
	Cukup; kemungkinan berhasilnya diperkirakan besar, relevan dengan tujuan organisasi, tetapi tidak mengatasi persoalan	2
	Kecil; kemungkinan berhasilnya kecil, tidak relevan dengan tujuan, tetapi dapat mengatasi sebahagian persoalan	1

Sumber: Hasil Olahan Penelitian (2018)

Analisis Hasil

1. Rangkaian Hubungan Sebab Akibat Permasalahan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya metode berpikir sistem ini akan menguraikan akar masalah yang pada umumnya tidak nampak secara langsung pada tahap pengamatan sumber-sumber masalah. Fenomena Gunung Es menjelaskan bahwa pada umumnya masalah yang nampak bukanlah masalah utama, sehingga penyelesaian pada masalah tersebut bersifat reaktif dan hanya bertahan pada waktu singkat.



Gambar 1. Tema Eksisting
(Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan kegiatan pariwisata yang berlangsung selama ini di Kabupaten Teluk Wondama dikelola oleh pemerintah pusat. Semakin kuat pengelolaan oleh pemerintah pusat maka akan semakin melemahkan peran dari pemerintah daerah dan juga keteraturan pola kunjungan wisatawan, karena selama ini pola kunjungan wisatawan lebih difokuskan pada wilayah perairan jarang sekali ada wisatawan yang kedarat sehingga masyarakat dan pemerintah daerah belum mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata yang ada. Sebaliknya apabila peran dari pemerintah daerah semakin meningkat maka akan ada solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada, dengan begitu keteraturan pola kunjungan wisatawan juga akan semakin meningkat.

Permasalahan yang terungkap pada observasi dan wawancara yang telah dilakukan merupakan permasalahan yang tampak di permukaan. Mengutip pendapat Rowitz (2002) bahwa permasalahan yang nampak dapat berupa fenomena gunung es yang memiliki akar masalah yang

seringkali tidak nampak. Untuk itu diperlukan upaya penelusuran permasalahan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari permasalahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan tema-tema yang sudah terungkap.

Tema-tema yang sudah terungkap dikelola sebagai tema eksisting yang ditelusuri bentuk korelasinya. Sesuai dengan model yang diungkapkan oleh Senge (1996) pada dasarnya antar komponen dalam suatu sistem memiliki hubungan sebab akibat dengan dua jenis korelasi, yaitu searah (semakin tinggi intensitas pada komponen sebab akan meningkatkan dampak pada komponen akibat atau semakin lemah komponen sebab akan mengurangi dampak pada komponen akibat) yang ditandai dengan tanda “+” (plus) dan berlawanan arah (semakin tinggi intensitas pada komponen sebab akan melemahkan dampak pada komponen akibat atau semakin lemah komponen sebab akan meningkatkan dampak pada komponen akibat) yang ditandai dengan tanda “-“ (minus).

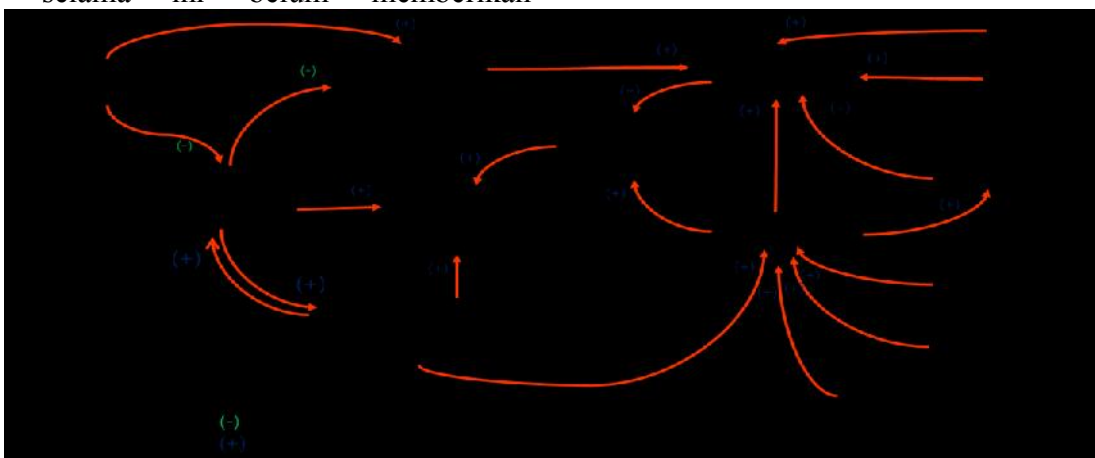
Tema-tema eksisting dikembangkan berpijak pada kerangka argumentasi logis. Dasar argumentasi logisnya adalah:

- a. Kegiatan wisata yang berlangsung selama ini belum memberikan

- b. manfaat kepada masyarakat lokal dan pemerintah daerah,
- b. Pola kunjungan wisatawan yang masih terpusat pada wilayah perairan, dikarenakan kurang adanya atraksi yang menarik wisatawan untuk turun ke darat.

Pengembangan faktor eksisting untuk memperoleh faktor-faktor baru menggunakan alat bantu berupa teknik Causal Loop Diagram (CLD). Dalam teknik CLD, faktor-faktor diubah menjadi variabel-variabel yang dapat diidentifikasi intensitasnya, sehingga dapat menelusuri beragam komponen yang memiliki kemungkinan keterkaitan dengan variabel tersebut. Penalaran yang dikembangkan dari setiap variabel dikombinasikan dengan penelusuran dokumen dan penggalian dari data lapangan. Bentuk-bentuk CLD saling dihubungkan untuk memperoleh gambaran yang paling lengkap dari penyebab dan akibat dari pengembangan pariwisata yang berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama selama ini. Dalam CLD faktor-faktor tersebut disusun sebagai variabel komponen sistem permasalahan.

Tema-tema hasil pengembangan dirangkai dalam suatu sistem bersama tema-tema sebelumnya sehingga memunculkan bentuk Causal Loop Diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Pengembangan Tema Eksisting

Sumber: Analisis Peneliti, 2018

Tema-tema yang sudah dikembangkan kemudian dirangkai dalam CLD model pertama didalami dan dieksplorasi lagi. Hasil pendalaman dan

feedback pada studi dokumen dan hasil induksi kualitatif menghasilkan model CLD sebagai berikut:



Gambar 3. Tema-Tema Eksisting setelah dikembangkan ada Penundaan (Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018)

Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan Pengelolaan oleh pemerintah pusat merupakan tema atau isu pertama yang kemudian dikembangkan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan metode berpikir sistem. Semakin kuat pengelolaan oleh pemerintah pusat mengakibatkan semakin kuat pengelolaan yang berkelanjutan dan semakin lemah peran daerah dibandingkan pemerintah pusat namun apabila peranderaah dibandingkan pemerintah pusat semakin kuat maka pengelolaan berkelanjutan akan semakin lemah disisi lain ketika peran pemerintah daerah semakin kuat maka alokasi anggaran pemerinrah daerah untuk pengembangan pariwisata akan semakin kuat setelah itu akan memperkuat peran pemerintah daerah, atraksi wisata dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

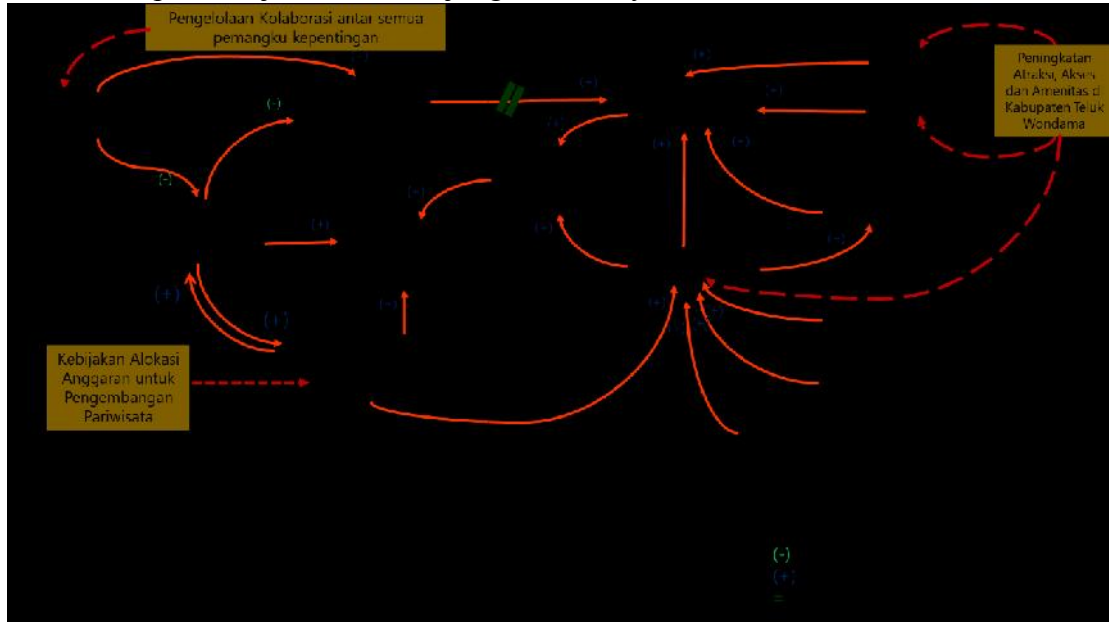
Disisi lain dengan semakin meningkatnya pengelolaan yang

berkelanjutan maka akan semakin kuat jumlah kunjungan wisatawan yang disebabkan oleh menguatnya akses, amenitas, promosi dan pemasaran, atraksi wisata, dan keteraturan pola kunjungan wisatawan. Atraksi wisata diperkuat oleh semakin kuatnya potensi pariwisata daerah, tour operator yang ada di objek wisata, dan juga kerjasama dari LSM/NGO di lokasi wisata serta alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata. Semakin kuat atraksi wisata maka akan semakin kuat juga promosi dan keteraturan pola kunjungan wisatawan. Apabila pola kunjungan wisatawan semakin kuat maka tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata akan semakin kuat juga diikuti oleh meningkatnya peran pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Pada gambar 3 pemodelan menggunakan Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa terdapat penundaan (delay) pada variabel Pengelolaan yang

berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pengelolaan berkelanjutan bersifat jangka panjang untuk itu ketika dilaksanakan akan berakibat pada jumlah kunjungan

wisatawan namun tidak secara langsung dan cepat sehingga masih bisa dilakukan penundaan. Untuk itu salah satu peluang yang dianggap dapat langsung membantu menyentuh masalah utama.



Gambar 4. Usulan Penyelesaian

(Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018)

2. Analisis Kebijakan

Selanjutnya pada tahap kedua penelitian ini dilakukan Analisis Kebijakan untuk mencari Alternatif Kebijakan yang tepat yang dapat diusulkan bagi pemerintah daerah kabupaten Teluk Wondama. Dari usulan penyelesaian yang ditemukan pada penelitian tahap pertama, kebijakan yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan dijadikan usulan kebijakan kepada pemerintah daerah adalah usulan penyelesaian yang ketiga, Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Teluk Wondama dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan usulan kebijaka pertama, perlu adanya keterlibatan dari semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini sebagai Kawasan konservasi Taman Nasional masuk

- dalam wilayah administrative 2 (dua) Propinsi dan 2 (dua) Kabupaten, untuk itu pemerintah kabupaten Teluk Wondama tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk melakukan pengelolaan kolaborasi. Perlu adanya intervensi dari pemerintahan kedua propinsi dan juga pemerintah pusat.
2. Kedua, kebijakan alokasi anggaran tidak mudah yang diharapkan. Sebagai kabupaten pemekaran yang baru dan juga pernah hancur dilanda bencana alam banjir bandang, kabupaten ini sedang fokus dalam membangun infrastruktur dan menata kebalik kabupatennya sehingga anggaran lebih difokuskan pada pengembangan kabupaten.
3. Ketiga, pengembangan destinasi wisata dalam hal ini pembangunan

daya tarik wisata, pengembangan dan peningkatan kemudahan akses, serta pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dinilai sebagai usulan penyelesaian yang cocok untuk dianalisis pada tahap kedua dengan menggunakan metode analisis kebijakan untuk mencari alternatif kebijakan terbaik bagi permasalahan yang ada ini. Usulan yang ketiga ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa harus menunggu koordinasi yang lama dari stakeholder yang lain. Selain itu, usulan penyelesaian ini lebih dibutuhkan oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan inti dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan pada visi dan misi Kabupaten Teluk Wondama, dimana kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama pengembangan Kabupaten ini maka pendekatan pariwisata berbasis masyarakat ditetapkan sebagai salah satu analisis dampak dari alternatif kebijakan pengembangan pariwisata yang akan di rekomendasikan. Diantaranya aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Setelah memperhatikan tujuan dampak dan kemungkinan resiko yang

akan ditimbulkan dengan adanya Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Teluk Wondama diperlukan pencarian alternatif kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Alternatif kebijakan yang diajukan dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan dari Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Teluk Wondama adalah agar masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Wondama dapat memanfaatkan kegiatan pariwisata sebagai sarana ekonomi tambahan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Papua.
2. Adanya sebaran kunjungan wisatawan ke wilayah tempat tinggal masyarakat agar masyarakat lokal bisa merasakan manfaat secara langsung dari kegiatan wisata yang ada selama ini.
3. Kesesuaian program dengan RTRW Kabupaten Teluk Wondama.

Untuk itu, berdasarkan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dicapai, maka berikut ini adaah beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan dan dijadikan salah satu alternatif dengan didasarkan pada kemampuannya memecahkan persoalan dengan mempertimbangkan dampak dan resiko yang ditimbulkannya:

Tabel 3. Pilihan Alternatif Kebijakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan

No	Alternatif Pilihan Kebijakan	Tujuan	Alasan Pemilihan Kebijakan	Kemungkinan Resiko/Dampak
1.	Pembangunan Daya Tarik Wisata	Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	Selama ini wisatawan jarang sekali mengunjungi wilayah darat karena belum ada atraksi yang menarik bagi mereka	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan • Biaya yang kecil • Perekonomian Meningkat
2.	Pengembangan dan peningkatan	Untuk mempermudah akses dan pergerakan	Akses menuju dan di lokasi wisata masih	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya besar • Pencemaran

*Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Teluk Wondama
(Elviaty Helinda Tauran Dan Achmad Djunaedi)*

	kemudahan akses	wisatawan menuju dan di objek wisata	sangat sulit. Selama ini wisatawan datang menggunakan kapal LOB karena keterbatasan akses yang ada	Lingkungan
3.	Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	Untuk mendukung perintisan pengembangan Destinasi Wisata	Sebagai kabupaten yang terbilang baru, fasilitas di Kabupaten Teluk Wondama masih sangat terbatas.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya investor baik dari dalam maupun luar negeri • Persaingan antara masyarakat lokal dengan investor

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2018)

Untuk melihat kelayakan masing-masing alternatif pilihan kebijakan ini, maka dilakukan penilaian yang sama terhadap masing-masing alternatif. Penilaian yang dilakukan selain penilaian berdasarkan kriteria pemilihan alternatif kebijakan, juga penilaian terhadap aspek yang akan berpengaruh terhadap masing-masing alternatif pilihan kebijakan.

Tabel 4. Pilihan Alternatif Kebijakan Menurut Dampak dan Resiko Yang Ditimbulkannya

Langkah Kebijakan	Dampak Positif	Resiko
Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah DTW di kawasan wisata TNTC • Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal • Memberikan PAD tambahan bagi pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya mahal • Culture Shock • Tingkat Kriminalitas meningkat
Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mensejahterakan masyarakat dan wisatawan • Memiliki akses yang mudah dijangkau • Wisatawan yang berkunjung semakin banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya mahal • Waktunya lama
Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas DTW • Memperbaiki perekonomian • Meningkatkan kualitas fasilitas wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat hanya menjadi penonton • Tingkat kriminalitas meningkat

<p>Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Akses dan Pengembangan Fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah DTW di kawasan wisata TNTC • Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal • Memberikan PAD tambahan bagi pemerintah daerah • Mensejahterakan masyarakat dan wisatawan • Memiliki akses yang mudah dijangkau • Wisatawan yang berkunjung semakin banyak • Meningkatkan kualitas DTW • Memperbaiki perekonomian • Meningkatkan kualitas fasilitas wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya mahal • Culture Shock • Tingkat Kriminalitas meningkat • Waktunya Lama • Masyarakat hanya menjadi penonton
<p>Pembangunan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Akses di Kabupaten Teluk Wondama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah DTW di kawasan wisata TNTC • Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal • Memberikan PAD tambahan bagi pemerintah daerah • Mensejahterakan masyarakat dan wisatawan • Memiliki akses yang mudah dijangkau • Wisatawan yang berkunjung semakin banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya mahal • Culture Shock • Tingkat Kriminalitas meningkat • Waktunya Lama
<p>Pembangunan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah DTW di kawasan wisata TNTC • Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal • Memberikan PAD tambahan bagi pemerintah daerah • Meningkatkan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya mahal • Culture Shock • Tingkat Kriminalitas meningkat • Waktunya Lama • Masyarakat hanya menjadi penonton

	<ul style="list-style-type: none"> • DTW • Memperbaiki perekonomian • Meningkatkan kualitas fasilitas wisata 	
Pengembangan Akses dan Pengembangan Fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mensejahterakan masyarakat dan wisatawan • Memiliki akses yang mudah dijangkau • Wisatawan yang berkunjung semakin banyak • Meningkatkan kualitas DTW • Memperbaiki perekonomian • Meningkatkan kualitas fasilitas wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya mahal • Tingkat Kriminalitas meningkat • Waktunya Lama • Masyarakat hanya menjadi penonton

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2018)

Berdasarkan dampak dan resiko yang ditimbulkan, maka analisis diperjelas sesuai dengan penjelasan yang disampaikan sebelumnya dalam tabel aspek penilaian yang lebih

spesifik, yaitu yang didasarkan pada biaya, tingkat kesulitan teknis, dan kemungkinan keberhasilannya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 5. Penilaian Alternatif Kebijakan Berdasarkan Dampak Positif

Alternatif Kebijakan	Aspek Penilaian			
	Dampak Positif	Biaya	Tingkat Kesulitan Teknis	Probabilitas Keberhasilan
Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	Besar	Kecil	Sedang	Cukup
Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Wisata	Besar	Cukup	Tinggi	Cukup
Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Wisata	Cukup	Kecil	Tinggi	Kecil
Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Akses dan	Besar	Besar	Tinggi	Besar

Pengembangan Fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama				
Pembangunan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Akses di Kabupaten Teluk Wondama	Besar	Besar	Tinggi	Cukup
Pembangunan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama	Cukup	Cukup	Sedang	Cukup
Pengembangan Akses dan Pengembangan Fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata	Cukup	Cukup	Tinggi	Cukup

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2018)

Tabel penilaian alternatif kebijakan yang dihasilkan diatas diperoleh dari hasil analisis terhadap usulan alternatif kebijakan yang telah dinilai berdasarkan aspek-aspek yang berpengaruh dan kriteria seleksi pemilihan kebijakan dengan standar yang sama untuk semua pilihan

kebijakan.

Untuk melihat hasil penilaian yang telah dilakukan berdasarkan analisis yang diukur dari aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kebijakan, maupun berdasarkan kriteria seleksi pemilihan kebijakan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Skor Penilaian Alternatif Pilihan Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Aspek Penilaian				Jumlah Skor
	Dampak Positif	Biaya	Tingkat Kesulitan Teknis	Probabilitas Keberhasilan	
Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	3	3	2	2	10
Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Wisata	3	2	1	2	8
Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Wisata	2	3	1	1	7

Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Akses dan Pengembangan Fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama	3	1	1	3	8
Pembangunan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Akses di Kabupaten Teluk Wondama	3	1	1	2	7
Pembangunan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama	2	2	2	2	8
Pengembangan Akses dan Pengembangan Fasilitas umum serta Fasilitas Pariwisata	2	2	1	2	7

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2018)

Dari hasil skor yang diperoleh, ternyata alternatif kebijakan yang mendapat skor paling tinggi adalah Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada yaitu dengan jumlah 10 (sepuluh). Sedangkan 6 (enam) alternatif lainnya memperoleh skor masing-masing 8 (delapan) dan 7 (tujuh). Namun untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memang layak untuk dipilih juga dilakukan seleksi melalui kriteria-kriteria pemilihan kebijakan seperti yang telah disampaikan dalam bab II. Kriteria pemilihan alternatif kebijakan tersebut adalah kesesuaian program dengan visi dan misi organisasi, dapat diterapkan atau diimplementasikan, dan dapat memberikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat.

Berdasarkan pada hasil analisis kebijakan di tahap kedua penelitian ini, setelah melakukan analisis dengan berbagai teori dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, maka alternatif terbaik

yang terpilih adalah Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.

KESIMPULAN

Sejauh ini pengembangan pariwisata masih fokus dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini BBTNTC, sehingga masyarakat lokal dan pemerintah daerah belum terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata. Pengelolaan oleh pemerintah pusat merupakan puncak dari fenomena gunung es, dimana dari masalah eksisting tersebut ditelusuri melalui metode berpikir sistem yang diwujudkan dalam bentuk Causal Loop Diagram diketahui bahwa pengelolaan oleh pemerintah pusat ini berakibat pada tingkat keterlibatan masyarakat yang kurang. Pengelolaan Kolaborasi antar pemangku kepentingan, kebijakan alokasi anggaran, peningkatan promosi dan pengembangan destinasi wisata di

Kabupaten Teluk Wondama merupakan solusi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Selanjutnya intervensi kebijakan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Teluk Wondama dianalisis pada tahap ke II berdasarkan analisis kebijakan publik. Berdasarkan pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan pariwisata, dan tujuan yang ingin dicapai yang diukur melalui kriteria pemilihan kebijakan yang telah ditentukan maka alternatif pilihan kebijakan yang ditawarkan adalah Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada karena sesuai dengan kebutuhan wisatawan untuk berwisata dan kebutuhan perekonomian masyarakat, alternatif kebijakan ini dapat mewakili kedua pihak, disini lain, dengan adanya objek-objek wisata baru di wilayah darat, pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dapat menarik retribusi dari wisatawan untuk menambag PAD bagi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkahti, & Anwar. 2015. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI SELATBARU KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 2, No 1 (2015)
- Hernowo W. 2010. RESOLUSI KONFLIK DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGELANG. TESIS MPKD UGM. Yogyakarta.
- Ismail. 2010. Analisis Kebijakan Penarikan Retribusi Pariwisata (Studi Implementasi Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol 8, No 4
- Kiswati. 2010. Analisis kebijakan pembangunan kawasan Padang Bay City di Kota Padang. Tesis Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta
- Kusmayadi, & Sugiarto. 2002. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- LAN. 2004. Kajian Paradigma Bacaan Peserta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
- LAN. 2015. Kajian Paradigma Bacaan Peserta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kementerian Pariwisata
- Murphy, Peter E. 1998. Community Driven Tourism Planning. *Tourism Management* 9
- Purwanto, & Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. JMKP-MAP. UGM Yogyakarta
- Sunaryo, Bambang 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: GAVA MEDIA
- World Tourism Organization. 2004. Indicators of Sustainable for Tourism Destination. Madrid: WTO.

Yaquob, Amak M., 2012. Pengaruh Mediasi Kepercayaan pada Hubungan antara Kolaborasi Supply Chain dan Kinerja

Operasi. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.14, No. 2 September 2012: Hal. 138-146